

**ANALISIS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DI KOTA BANJARBARU
MENGUNAKAN PENDEKATAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA
(DOMAIN PENDIDIKAN DAN LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA)**

***ANALYSIS OF YOUTH DEVELOPMENT IN BANJARBARU CITY USING
THE APPROACH OF YOUTH DEVELOPMENT INDEX (YOUTH
EDUCATION AND EMPLOYMENT DOMAIN)***

Siska Fitriyanti¹ dan Herry Azhar Pradana²

^{1,2}Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: fitriyantisiska@kalselprov.go.id

Diserahkan: 15/04/2022; Diperbaiki: 14/05/2022; Disetujui: 24/05/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i1.257

Abstrak

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Pemuda, Pembangunan Kepemudaan, Rata-rata Lama Sekolah, APK Sekolah Menengah, APK Perguruan Tinggi, Lapangan dan Kesempatan Kerja

Abstract

The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region, which is vital to prepare the quality of youth in the future. To support the achievement of YDI, governments on the district level are obliged to optimize planning youth development in each region. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators (MYS, Gross Enrolment Rate in Secondary Education, white-collar entrepreneur, and youth unemployment ratio). This study used a qualitative approach and analyzed by literature review. Primary data was obtained through interviews, while the secondary data were mainly from Statistic Bureau and other relevant documents. The analysis showed that the education sector is on the right track. However, there was a problem in the employment sector: the mismatch between workforce competence and

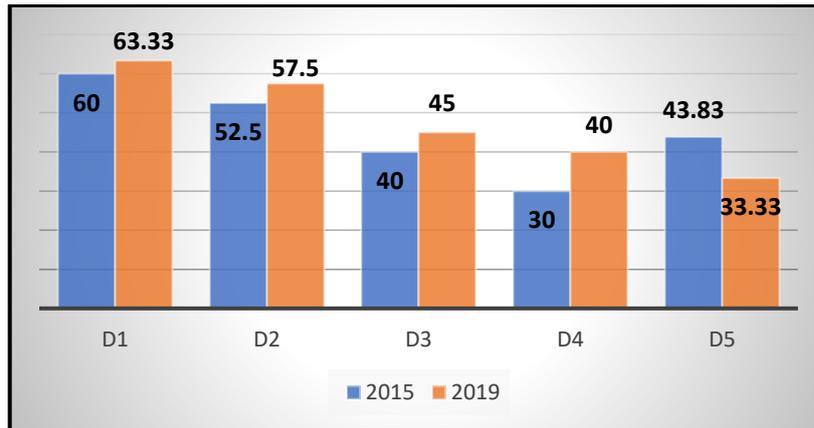
employment opportunities wich resulted in the high of youth unemployment ratio in Banjarbaru.

Keywords: *Youth Development Index, Youth Development, MYS, GER in Secondary Education, Employment Opportunities*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menempatkan pemuda beserta peranannya dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dalam salah satu tujuannya, yaitu dalam target pendidikan berkualitas. Istilah *pemuda* yang banyak digunakan dalam dokumen TPB ini bertujuan untuk mewakili suara milineal dalam pembangunan berkelanjutan (Yusof and Ariffin 2021). Target spesifik pemuda dalam tujuan tersebut adalah: (a) Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda yang memiliki keterampilan yang relevan untuk pekerjaan yang layak; (b) pada tahun 2030, pemuda mencapai pekerjaan tetap, produktif, dan layak, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya; dan (c) pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan. Dalam rangka mendukung pencapaian TPB tersebut, maka harus ada kebijakan pembangunan kepemudaan yang berbasis data. Oleh karena itu diperlukan suatu instrument yang dapat memetakan kemajuan pembangunan di sektor kepemudaan. Di level internasional, instrument ini diimplementasikan melalui *Youth Development Index* (YDI). Rumusan YDI dapat berbeda di setiap negara, akan tetapi pada dasarnya mencakup 4 (empat) aspek pemuda yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta partisipasi (Deputi Pemberdayaan Pemuda 2018). Di Indonesia, YDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP). Penyusunan IPP di Indonesia berdasarkan pada terbitnya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Kerangka kerja IPP telah disusun sejalan dengan TPB agar dapat menunjang upaya pencapaian TPB di Indonesia. IPP juga bermanfaat untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat nasional maupun regional, untuk meninjau efektifitas kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan TPB di Indonesia (KPPN/Bappenas 2018).

Selama periode tahun 2015-2019, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam kelompok daerah dengan IPP rendah. Pada tahun 2015, Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-31 (43,83) dengan IPP nasional 47,33. Pada tahun 2019, peringkat Kalimantan Selatan turun ke angka 34 (47,83) dengan IPP Nasional 52,67. Nilai IPP Kalimantan Selatan naik sebanyak 3,95 poin sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, akan tetapi kenaikan rata-rata IPP secara nasional adalah 5,34 poin, sehingga IPP Kalimantan Selatan belum bisa mengejar akselerasi rata-rata nasional (Bappeda Kota Banjarbaru 2020).



Gambar 1. Dinamika Capaian IPP Kalimantan Selatan Berdasarkan Domain (2015 & 2019)
(Sumber: KPPN/Bappenas 2020, diolah)

Keterangan:

- D1 : Domain Pendidikan
- D2 : Domain Kesehatan & Kesejahteraan
- D3 : Domain Lapangan & Kesempatan Kerja
- D4 : Domain Partisipasi & Kepemimpinan
- D5 : Domain Diskriminasi & Gender

Berdasarkan laporan dari Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020, ada 2 domain yang menjadi sorotan dalam capaian IPP di Indonesia pada umumnya, dan juga berlaku di Kalimantan Selatan. Domain pertama adalah Pendidikan, yang mana meskipun selalu menjadi domain yang bernilai paling tinggi, tetapi masih ada terdapat beberapa isu strategis yang harus dibenahi. Permasalahan dalam sektor Pendidikan antara lain kesenjangan partisipasi Pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, rendahnya akses pemuda ke perguruan tinggi, dan minimnya inklusivitas dalam pendidikan tinggi. Domain kedua adalah Lapangan dan Kesempatan Kerja, dimana permasalahan utamanya adalah TPT Pemuda yang masih tinggi dan minimnya pemuda berwirausaha.

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kawasan administratif di Provinsi Kalimantan Selatan yang berkembang cukup pesat, baik dari segi pembangunan maupun kualitas manusia. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru merupakan yang terpadat kedua setelah Kota Banjarmasin, yakni sekitar 270.021 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,79 per tahun dan kepadatan penduduk 707 jiwa/km². Sedangkan penduduk yang masuk dalam kelompok usia 19 – 30 tahun (kategori pemuda) kurang lebih 70 ribu jiwa atau 26 persen dari total populasi penduduk Kota Banjarbaru, dan 7 persen dari total pemuda yang ada di Kalimantan Selatan (BPS, 2020). Selama 10 tahun terakhir, kualitas pembangunan manusia Kota Banjarbaru selalu menempati posisi tertinggi di Kalimantan Selatan, yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017, pemerintah daerah harus membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan yang merupakan turunan dari Rencana Aksi Nasional (RAN). Hingga saat ini, nilai IPP di Indonesia hanya sampai tingkat provinsi, dan belum tersedia di tingkat kota/kabupaten. Hal ini dikarenakan data-data yang digunakan untuk memproyeksikan setiap domain cukup sulit didapatkan di tingkat kabupaten/kota. Beberapa data belum dapat disediakan secara berkala oleh BPS sebagai penyedia data. Meski demikian, kabupaten/kota sudah harus mempersiapkan pembangunan kepemudaan di wilayahnya masing-masing agar dapat menunjang capaian IPP Kalimantan Selatan. Tulisan ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di Kota Banjarbaru berdasarkan domain pendidikan dan domain lapangan & kesempatan kerja. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan atau program yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan kepemudaan di Kota Banjarbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literatur review*. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan informan/responden yang telah ditentukan secara *purposive sampling*. Data primer domain Pendidikan diambil dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, sedangkan data untuk domain lapangan & kesempatan kerja diambil dari Dinas Koperasi & UMKM serta Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskopukmnaker) Kota Banjarbaru. Data sekunder terutama diambil dari BPS dan sumber data lain yang relevan dengan domain Pendidikan dan domain lapangan & kesempatan kerja (jika data BPS tidak tersedia). Data sekunder berupa angka capaian yang berhubungan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Pemuda, APK Perguruan Tinggi (APK-PT), pemuda berwirausaha (kerah putih), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda selama 3-5 tahun terakhir (sebanyak yang tersedia), Laporan Kinerja, Renstra, DPA SKPD, dan literatur terkait. Data dianalisis secara deskriptif eksploratif.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS tahun 2019, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebanyak 262.719 orang yang terdiri dari 134.987 laki-laki dan 127.732 perempuan atau dengan *sex ratio* 106 yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru tercatat 1,14 persen/tahun. Laju pertumbuhan IPM Kota Banjarbaru rata-rata 0,53 persen per tahun. Dengan laju pertumbuhan ini, maka IPM Kota Banjarbaru akan mencapai 80 (kategori sangat tinggi) di tahun 2021. Dengan demikian, pembangunan di Kota Banjarbaru sudah sangat baik jika dilihat dari kacamata IPM.

Kondisi Sektor Pendidikan berdasarkan Indikator IPP di Kota Banjarbaru

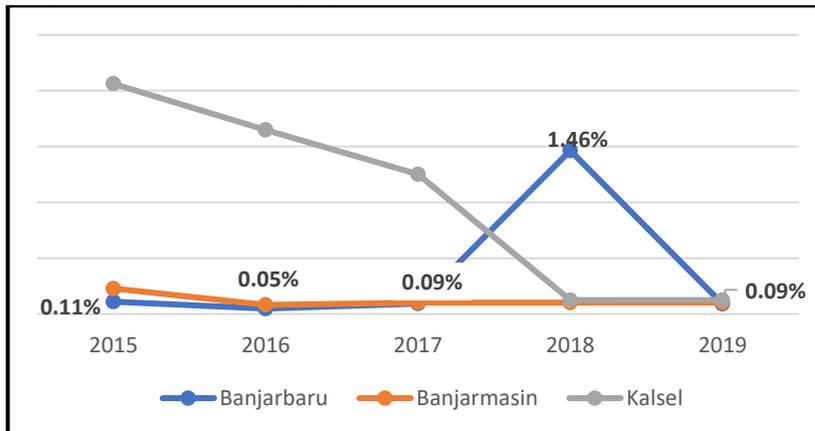
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk dapat menyediakan dan menjamin kelangsungan pendidikan yang dapat ditempuh oleh semua penduduk berusia sekolah, serta selalu meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut diuraikan mengenai kondisi sektor pendidikan di Kota Banjarbaru berdasarkan parameter Rata-rata Lama Sekolah (RLS), APK Sekolah Menengah, dan APK Perguruan Tinggi.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikannya (dalam satuan tahun). Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi rata-rata jenjang pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, RLS sedikit banyaknya dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan pendidikan yang telah ditempuh.

Capaian RLS Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah 10,94 tahun, hampir setara untuk menyelesaikan kelas XI di Sekolah Menengah Atas. Perbandingan dengan Kota Banjarmasin (sebagai peraih peringkat IPM ke-2 di Kalimantan Selatan) adalah 9,94 tahun (hampir setara dengan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan kelas X), dan rata-rata Kalimantan Selatan di angka 8,01 tahun (setara dengan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan kelas VIII, masih di tingkat SMP/ sederajat). Meski demikian, pertumbuhan RLS Kota Banjarbaru mulai melambat selama 10 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan RLS selama tahun 2010 hingga 2019 adalah 1,07 persen/tahun, sedangkan Kota Banjarmasin memiliki angka rata-rata pertumbuhan 1,69 persen/tahun, dan laju pertumbuhan RLS Kalimantan Selatan 1,1 persen/tahun. Dengan asumsi laju pertumbuhan stabil selama beberapa tahun ke depan, maka Kota Banjarbaru baru akan mencapai RLS 12 tahun pada tahun 2035, sedangkan Kota Banjarmasin dengan laju pertumbuhan 1,69

persen/tahun akan meungguli RLS Kota Banjarbaru di tahun 2021, dan akan dapat mencapai RLS 12 tahun di tahun 2023.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan RLS Kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan (2015-2019)
(Sumber: BPS 2020, diolah)

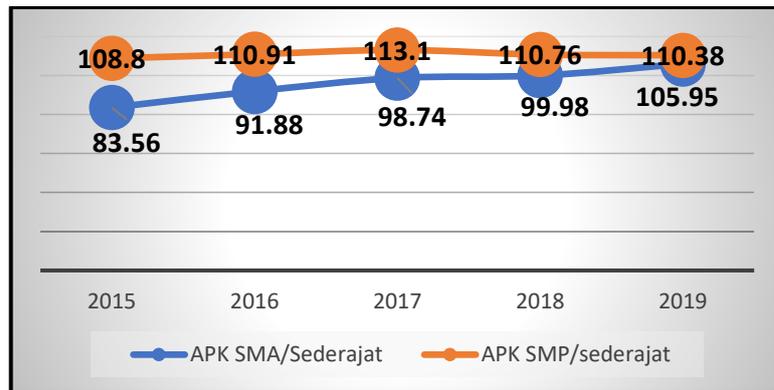
Pemerintah Kota Banjarbaru sejauh ini masih menerapkan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Jika mengacu salah satu kegiatan dalam usaha peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda, maka Pemerintah Kota Banjarbaru harus mulai mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah

APK Sekolah Menengah (APK-SM) adalah persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk berusia 16-18 tahun. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Sekolah Menengah memang tidak termasuk dalam ranah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru, akan tetapi merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan. Meski demikian, penduduk yang dapat mencapai jenjang sekolah menengah atas tentunya telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, yaitu SD dan SMP, yang masih ranah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan kepemudaan, maka diperlukan pelayanan pendidikan yang berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi.



Gambar 3. Dinamika APK SMP dan SMA/ sederajat di Kota Banjarbaru (2014-2019)
Sumber: Pusat Data dan Statistik dan Kebudayaan (2020)

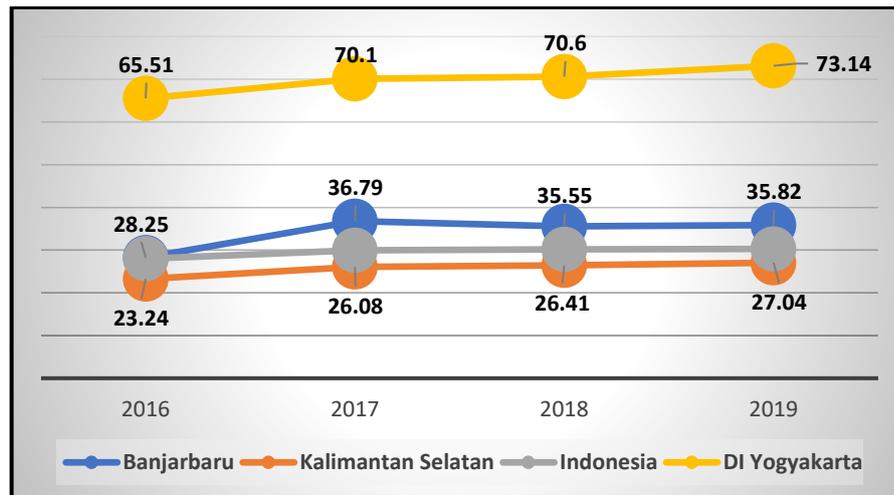


Gambar 4. Dinamika APK SMP dan SMA/ sederajat di Kota Banjarbaru (gabungan data Kemendikbud & Kemenag) Tahun 2015-2019
Sumber: Pusat Data dan Statistik dan Kebudayaan (2020)

Gambar 4 adalah data APK yang hanya terdiri atas sekolah umum (SMP/SMA/SMK), SLB (sesuai jenjang), dan Paket B/C. APK SMP-SM Kota Banjarbaru menunjukkan trend meningkat/naik. APK SMP tahun 2019 adalah 80,25, artinya 80 persen penduduk berusia 13-15 tahun 'terdata' bersekolah di jenjang SMP. Begitu pula dengan APK SMA/ sederajat sebesar 88,26, yang berarti 88 persen penduduk berusia 16-18 tahun 'terdata' bersekolah jenjang SMA/ sederajat. Gambar 5 adalah data APK yang terdiri atas sekolah umum, sekolah madrasah, dan pondok pesantren yang memiliki program kesetaraan dengan pendidikan formal. Data ini menjelaskan *gap* yang ada di data sebelumnya, yaitu jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak terdata di data APK ternyata tersebar di sekolah madrasah dan pondok pesantren. Berdasarkan grafik pada gambar 5, tren APK SMP dan SMA/ sederajat di Kota Banjarbaru terus naik setiap tahunnya. Di tahun 2019, APK SMP/ sederajat adalah 100,38 dan APK SMA/ sederajat 105,95. Hal ini menunjukkan bahwa semua penduduk di kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun bersekolah sesuai jenjang pendidikannya.

APK Perguruan Tinggi

APK Pendidikan Tinggi (APK-PT) adalah jumlah penduduk berusia 19-23 tahun yang melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Secara nasional, APK PT Indonesia tahun 2019 ada di angka 30,28. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir Renstra Kemenristekdikti tahun 2019 yaitu sebesar 32,55, maka capaian APK-PT di Indonesia belum mencapai target yang ditetapkan (Kemenristekdikti, 2018). Berikut dinamika capaian APK PT Kota Banjarbaru dibandingkan dengan APK-PT Kalimantan Selatan, rata-rata nasional, dan Provinsi DIY sebagai peraih APK PT tertinggi di Indonesia (Gambar 6).



Gambar 5. Posisi relatif APK PT Banjarbaru terhadap Kalimantan Selatan, DI, Yogyakarta, dan nasional (2015-2019)

Sumber: BPS (2020), diolah.

Berdasarkan gambar 6, APK-PT Kota Banjarbaru di atas Kalimantan Selatan dan rata-rata nasional. Pada tahun 2019, APK-PT Kota Banjarbaru 35,82%. Artinya dari total penduduk berusia 19-24 tahun, sebanyak 35,82% menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarbaru (2019), pendidikan tinggi yang ditempuh berkisar dari Diploma I (D1) hingga Strata 2 (S-2). Persentase terbesar ada di jenjang pendidikan Strata I (S-1), yaitu sebanyak 12,48 persen telah menyelesaikan jenjang S-1, dan 11,33 persen sedang berkuliah di jenjang S-1. Persentase lengkap disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Persentase Penduduk Kota Banjarbaru Kelompok Usia 19-30 Tahun yang Berkuliah di Tahun 2019

Berkuliah	Jenjang Kuliah							
	DI/D2	D3	D4	S1	Profesi	S2	S3	Total
Pernah	0,18	0,75	0,93	12,48	0,25	0,36	0,00	14,95
Sedang	0,00	2,69	1,76	11,33	0,00	0,81	0,00	16,59

Sumber: BPS Kota Banjarbaru (2020)

Rata-rata laju pertumbuhan APK-PT Kota Banjarbaru tahun 207-2019 adalah 6,83 persen/tahun; Kalimantan Selatan 4,82 persen/tahun; nasional 4,35 persen/tahun; sedangkan Prov. D.I.Y sebagai peringkat APK PT tertinggi di Indonesia memiliki laju pertumbuhan 2,94 persen/tahun. Laju pertumbuhan APK-PT Kota Banjarbaru jauh melampaui rata-rata Kalimantan Selatan, bahkan di atas Prov. DIY. Jika diasumsikan laju pertumbuhan APK-PT Kota Banjarbaru stabil di angka 6,83 persen/tahun, maka pada tahun 2026 APK-PT Kota Banjarbaru akan mencapai 51,82 persen, artinya separuh penduduk usia kuliah telah mendapatkan layanan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Sedangkan proyeksi APK-PT Kalimantan Selatan (dengan asumsi laju pertumbuhan stabil di 4,82 persen/tahun) di tahun 2026 baru mencapai 36,17 persen.

Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2018, tercatat ada 3 PTN dan 46 PTS dengan 283 program studi yang ada di Kalimantan Selatan (Kemenristekdikti 2018). Terdapat satu PTN dan satu PTS yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yaitu Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Achmad Yani (Uvaya). Meskipun perguruan tinggi telah berdiri dari jenjang D3 hingga S3, akses masyarakat (terutama pemuda) terhadap pendidikan tinggi masih belum inklusif. Kendala umumnya adalah biaya pendidikan di perguruan tinggi yang relatif mahal. Meskipun siswa yang bersangkutan cerdas dan berprestasi, permasalahan biaya masih menjadi hal yang tidak dapat dihindari (Herman 2018).

Kondisi Sektor Lapangan dan Kesempatan Kerja berdasarkan Indikator IPP di Kota Banjarbaru

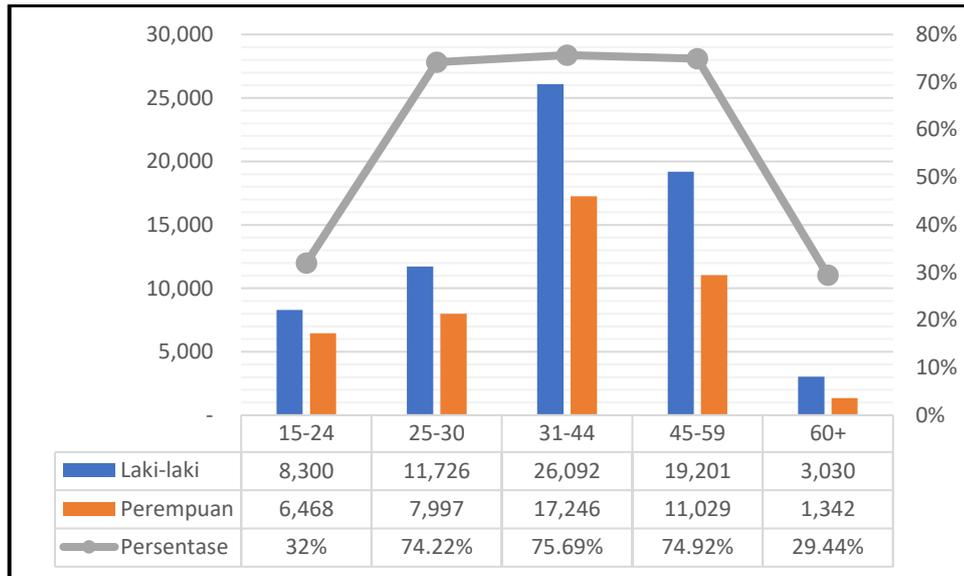
Potensi tenaga kerja secara langsung dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk berusia di bawah 15 tahun, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Selain itu tidak semua penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam posisi siap bekerja, karena sebagian mereka ada yang mengurus rumah tangga, sedang menempuh masa pendidikan, dan sebagian lainnya sebagai penerima pendapatan saja, yang mana disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (Yusniar 2013).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banjarbaru pada tahun 2019 adalah 63,46 persen. Dari total angkatan kerja tersebut, 94,94 persen kegiatannya adalah bekerja dan 5,06 persen kegiatannya mencari pekerjaan atau berstatus pengangguran (Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja Kota Banjarbaru 2018).

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena kelahiran dan kematian maupun karena migrasi. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Banjarbaru mencapai 248.423 jiwa, dan sekitar 72,93 persen-nya merupakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja. Dalam sudut pandang IPP, ada dua indikator yang sejauh ini dianggap dapat menggambarkan kondisi lapangan dan kesempatan kerja yang tersedia untuk pemuda, yaitu pemuda wirausaha kerah putih (*white collar*) dan TPT pemuda.

Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Pemuda wirausaha kerah putih adalah persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap, dan jenis jabatan kerah putih dibagi jumlah pemuda umur 16- 30 tahun. Berdasarkan data dari Statistik Pemuda (2018), persentase pemuda bekerja berdasarkan tipe daerah perkotaan di Kalimantan Selatan sebesar 52,93 persen. Kendala dalam analisis sektor ini adalah data terkait jumlah usaha yang dimiliki pemuda ataupun jumlah wirasusaha muda masih belum tersedia di tingkat kabupaten/kota. Data terdekat yang bisa digunakan adalah data Sakernas 2018. Oleh karena itu, analisis indikator ini menggunakan pendekatan dan asumsi berdasarkan data Sakernas tahun 2018 tentang jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan seminggu yang lalu berdasarkan kelompok umur. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru berdasarkan kelompok umur, sehingga menghasilkan persentase penduduk bekerja di Kota Banjarbaru berdasarkan kelompok umur tahun 2018 (Gambar 7).



Gambar 6. Persentase Penduduk Kota Banjarbaru yang Melakukan Pekerjaan Seminggu yang Lalu berdasarkan Kelompok Umur (2018)

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2020 (diolah)

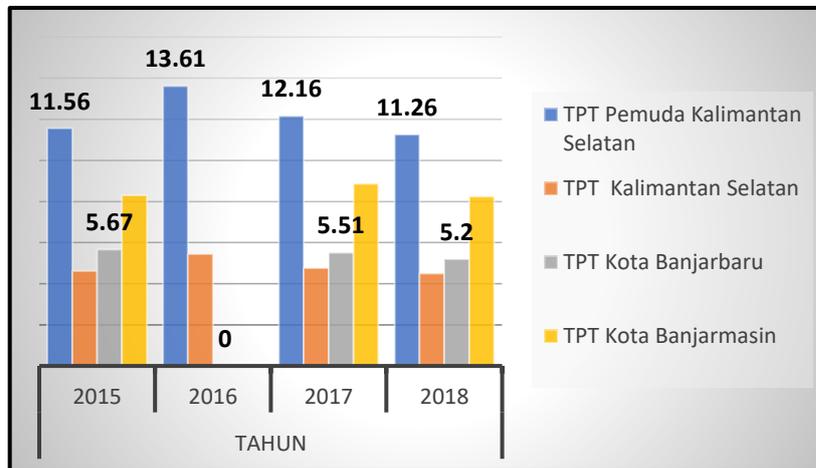
Kelompok usia 15-24 tidak dimasukkan dalam penghitungan dengan asumsi kelompok usia ini Sebagian besar masih bersekolah. Persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kegiatan di tipe daerah perkotaan di Kalimantan Selatan sebanyak 52,93 persen., sedangkan rata-rata nasional 51,28 persen. Persentase penduduk usia 25-30 yang bekerja di Kota Banjarbaru adalah 74,22 persen, lebih tinggi dari nilai rata-rata Kalimantan Selatan dan nasional.

Berdasarkan data BPS Kota Banjarbaru (2020), pemuda bekerja didominasi oleh pekerja sektor formal 62 persen, sedangkan sisanya bekerja di sektor non formal sebanyak 38 persen. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan jenjang pendidikan adalah: (a) SD 19 persen; (b) SMP 19 persen; (c) SMA 29%; (d) SMK 10%; (e) Diploma 6 persen; dan (f) universitas 17 persen. Berdasarkan data BPS Kota Banjarbaru (2019), pelaku UMKM di Kota Banjarbaru mencapai 9.327 orang (mayoritas bergerak pada sektor kuliner 3.031 unit, dan kerajinan sekitar 1.600 unit) atau berjumlah sekitar 3,6 persen dari jumlah penduduk Kota Banjarbaru. Data ini tidak memiliki keterangan kelompok umur sehingga cukup sulit untuk memilah pemuda yang memiliki usaha. Di sisi lain, dinas terkait juga belum dapat menjangkau semua UMKM secara keseluruhan karena sampai akhir 2019 pelaku UMKM yang mendapatkan pembinaan langsung baru sekitar 1.800-an orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda

Pengangguran merupakan permasalahan serius di Indonesia karena sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan di sektor perluasan lapangan kerja agar angka pengangguran dapat ditekan (Wardhana and Kharisma 2021). TPT pemuda adalah persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16- 30 tahun. Parameter TPT berfungsi untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah agar dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan sekaligus menjadi evaluasi proses pembangunan yang telah berjalan (BPS: Statistik Pemuda, 2018). Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2019 yang dirilis oleh BPS, TPT pemuda Indonesia tahun 2019 sebesar 13,03 persen. Menurut tipe daerah, TPT pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan (14,22 persen berbanding 11,39 persen). TPT pemuda belum tersedia di tingkat kabupaten/kota, sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk bisa melihat gambaran TPT pemuda di Kota

Banjarbaru. Pendekatan yang digunakan adalah melihat perbandingan TPT Kalimantan Selatan, TPT pemuda Kalimantan Selatan, dan TPT Kota Banjarbaru untuk menghasilkan perkiraan TPT pemuda Kota Banjarbaru. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa TPT Pemuda Kota Banjarbaru merupakan irisan dari TPT Pemuda Kalimantan Selatan, TPT Kalimantan Selatan, dan TPT Kota Banjarbaru.



Gambar 7. Grafik Indikator Makro Ketenagakerjaan

Sumber: Data Sakernas (diolah).

**Tahun 2016 tidak dilaksanakan Sakernas*

Berdasarkan pengolahan data dengan asumsi yang telah diuraikan sebelumnya, TPT Pemuda di Kota Banjarbaru berada di angka 13,01 (tahun 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja berusia 16-30 tahun, terdapat kurang lebih 13 orang yang tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, dan/atau mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja dengan rentang usia 16-30 tahun di Kota Banjarbaru adalah 32.623 jiwa, sehingga total pemuda menganggur sekitar 4.194 jiwa. Kondisi ini cukup memprihatinkan, dikarenakan komposisi penduduk usia produktif yang bekerja di Kota Banjarbaru masih didominasi penduduk berpendidikan SD-SMA yaitu sekitar 77 persen (BPS Kota Banjarbaru 2019), artinya serapan tenaga kerja berpendidikan tinggi masih kecil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helvira dan Rizki (2020) tentang pengaruh IPM terhadap TPT di Kalimantan Barat, angka IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan posisi Kalimantan Barat sebagai daerah perkotaan yang banyak menerima arus migrasi. Begitu pula kondisi di Kota Banjarbaru sebagai salah satu daerah perkotaan di Kalimantan Selatan yang penduduknya sangat heterogen akan tetapi tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang cukup sehingga angka TPT Pemuda cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyaturridho (2021) mengungkapkan bahwa IPM berpengaruh positif secara signifikan terhadap TPT di Provinsi Sumatera Utara. Setiap kenaikan 1 rasio IPM akan meningkatkan TPT sebesar 0,9 persen.

Tingginya fenomena pengangguran terdidik di kalangan pemuda ini merupakan masalah yang cukup besar. Secara teori, pendidikan yang tinggi berhubungan positif dengan produktivitas. Semakin tinggi pendidikan pemuda pekerja, akan semakin tinggi produktivitas kerja mereka, sehingga *output* yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pendidikan yang semakin tinggi mendorong pemuda untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam pekerjaan, yang berujung pada semakin tinggi pula upah/gaji yang akan diterima. (BPS: Statistik Pemuda Indonesia, 2019). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sari (2013) dan Ramiayu (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Begitu pula dengan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Siskawati, Surya, dan Sudeska (2021) yang menyatakan bahwa RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Saat RLS di suatu wilayah tinggi, maka bisa diperkirakan tingkat pengangguran juga tinggi. Pendidikan yang tinggi menyebabkan orang lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Mereka cenderung memilih tidak bekerja daripada bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan kualifikasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Kopukmnaker Kota Banjarbaru, kondisi riil di lapangan banyak terjadi *missmatch* (ketidaksesuaian) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia, yang mana menyebabkan masih tingginya TPT pemuda di Kota Banjarbaru. Perkembangan lapangan usaha di sektor perdagangan dan jasa di Kota Banjarbaru sedikit banyaknya berpengaruh dalam dinamika TPT Pemuda. Selama 10 tahun terakhir, terjadi pergeseran daya serap lapangan kerja dari sektor sekunder (industri pengolahan) ke ke sektor tersier (jasa). Di Kalimantan Selatan, tahun 2020 kelompok sektor tersier wilayah perkotaan menyerap 67,60 persen angkatan kerja, sedangkan pada sektor sekunder (manufaktur atau pengolahan) 21,07 persen, dan sektor primer 11,33 persen. Sedangkan pengelompokan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di daerah perkotaan didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat (33, 65 persen) dan lulusan SD (30,62). Hanya 17,98 persen tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi (BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021).

Program Pemerintah yang Mendukung Pembangunan Kepemudaan di Domain Pendidikan

Sejak tahun 2017, kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/Sederajat yang sebelumnya di bawah Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dialihkan ke ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Perubahan ranah kewenangan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengalihan kewenangan pendidikan tingkat SMA/ sederajat kepada Pemerintah Provinsi bertujuan agar dapat mencapai prioritas penuntasan program wajib belajar 12 tahun. Dengan pembagian kewenangan ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat lebih fokus untuk membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Anak (PAUD), dan Pendidikan Masyarakat secara lebih optimal dan maksimal (Muhammad 2016). Indikator pendidikan dalam ranah IPP memang lebih banyak bersinggungan dengan urusan Pemerintah Provinsi. Meski demikian, upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun harus berjalan secara komprehensif dari jenjang pendidikan terbawah secara inklusif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan sudah melakukan rintisan terhadap Wajib Belajar 12 tahun yang menjamin semua anak usia 16-18 tahun dapat menamatkan jenjang SMU sederajat. Kebijakan ini telah didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan yang secara implisit pada Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap penduduk yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun”. Perda ini semakin memperkuat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota tentang Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pengembangan TV Edukasi di Kalimantan Selatan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* No. 1 Tahun 2009 Tanggal 23 Januari 2009.

Secara umum, kondisi pendidikan sekolah menengah di daerah perkotaan lebih maju dibandingkan dengan di daerah perdesaan, terutama dari segi fasilitas dan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung membuat kualitas pendidikan di wilayah perkotaan menjadi lebih baik (Cynthia, Martono and Indriayu 2016), (Huda 2021). Meski demikian, sektor pendidikan di daerah perkotaan juga masih banyak memiliki permasalahan. Permasalahan yang cukup besar adalah tingginya biaya pendidikan di daerah perkotaan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi hingga menggratiskan biaya pendidikan di sekolah. Akan tetapi hal ini ternyata

juga menimbulkan permasalahan lain, keterbatasan kuota penerimaan di sekolah negeri menyebabkan para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri harus masuk ke sekolah swasta. Biaya pendidikan sekolah swasta yang relatif tinggi menjadi beban bagi para orang tua siswa yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga banyak anak-anak di kawasan perkotaan yang akhirnya putus sekolah (Saepuloh and Suherman 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatah, Suhaili, dan Farida (2021), tingkat partisipasi pendidikan semakin menurun seiring naiknya jenjang pendidikan. Fenomena ini kemungkinan besar disebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat faktor biaya, kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta faktor lingkungan (Mua, Manginsela and Baroleh 2017). Permasalahan menurunnya minat masyarakat di setiap kenaikan jenjang pendidikan ini patut mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah. Salah satu solusi adalah alokasi anggaran untuk dana pendidikan sekolah menengah ke atas dan beasiswa antar jenjang pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rutfiana dan Hayati (2020), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan APK SMA/ sederajat. Pemberian subsidi pendidikan yang berasal dari dana BOS ini terbukti meningkatkan minat dan permintaan masyarakat terhadap layanan Pendidikan SMA/ sederajat, sehingga juga meningkatkan APK SMA/ sederajat.

Program Pemerintah yang Mendukung Pembangunan Kepemudaan di Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha. Program-program pelatihan juga telah dikembangkan dan dijalankan dengan model Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika dilihat dari sisi jenis lapangan kerja yang tersedia, sektor sekunder (industry pengolahan) dan tersier (jasa) masih mendominasi pasar kerja di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha dapat dijadikan salah satu parameter untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Mempersiapkan angkatan kerja terdidik dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pada masa sekarang maupun masa depan merupakan hal strategis yang perlu direncanakan secara strategis demi menjaga pertumbuhan ekonomi dan prospek pembangunan di daerah agar lebih berkesinambungan. Prioritas tentunya akan difokuskan pada pendidikan, strategi pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan yang dikaitkan dengan strategi pertumbuhan. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan, membuat masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan potensi diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis.. Pada setiap jenis pekerjaan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan mengalami perubahan, seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan akan proses dan pelayanan produksi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kepemudaan di domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja di Kota Banjarbaru telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian parameter RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT Pemuda. RLS dan APK SM Kota Banjarbaru di atas capaian Kalimantan Selatan dan rata-rata nasional, sedangkan APK-PT meskipun di atas capaian Kalimantan Selatan tetapi masih di bawah rata-rata nasional. Di domain lapangan dan kesempatan kerja, persentase pemuda wirausaha kerah putih di Kota Banjarbaru di atas capaian Kalimantan

Selatan dan rata-rata nasional, tetapi perkiraan TPT Pemuda Kota Banjarbaru di atas nilai TPT Pemuda Kalimantan Selatan, meski masih di bawah rata-rata nasional. Permasalahan yang ada di sektor ini adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Mayoritas lulusan perguruan tinggi di Kota Banjarbaru memiliki latar belakang keilmuan di sektor primer, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini lebih banyak di sektor tersier.

REKOMENDASI

Minimnya data di beberapa indikator penyusun IPP merupakan kendala utama dalam penelitian ini. Di sisi lain, IPP sudah menjadi indikator kinerja utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kabupaten/kota untuk mempersiapkan dan menyiapkan data kepemudaan yang komprehensif dan diperbarui secara berkala dalam rangka menunjang upaya peningkatan IPP Kalimantan Selatan. Adanya kesenjangan data antara BPS dan SKPD teknis juga seringkali menjadi perdebatan. Untuk memitigasi hal ini, peningkatan dialog dan koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah juga akan sangat membantu dalam upaya perbaikan capaian IPP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan salah satu segmen dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjarbaru pada tahun 2020. Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bappeda Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan bergabung dalam kegiatan penelitian ini dan kepada anggota tim peneliti lainnya yaitu Ir. Gusti Syahrani dan Maliani SKM, MM, M.Epid.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyaturridho. 2021. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara*. Magister Thesis, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Bappeda Kota Banjarbaru. 2020. *Kajian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Banjarbaru*. Laporan Akhir, Banjarbaru: Bappeda Kota Banjarbaru.
- BPS Kota Banjarbaru. 2019. *Statistik Kota Banjarbaru 2019*. Banjarbaru.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2020. *Tabel Dinamis*. Juli 13. Accessed Maret 19, 2020. <https://kalsel.bps.go.id/site/pilihdata.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2020*. Publikasi Berkala, Banjarbaru: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Cynthia, Lela Camellia, Trisno Martono, and Mintasih Indriayu. 2016. "Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XII IS di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016." *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi* 1-20.
- Deputi Pemberdayaan Pemuda. 2018. *Apa dan Mengapa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)*. Juli 13. Accessed Maret 19, 2020. <http://deputi1.kemempora.go.id/read/apa-dan-mengapa-indeks-pembangunan-pemuda-ipp>.
- Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. 2018. *Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja Kota Banjarbaru*. Banjarbaru.

- Fatah, Abdul, Muhammad Suhaili, and Isna Farida. 2021. "Analisis Indikator Pendidikan: Partisipasi Pendidikan di Indonesia Periode 1994-2018." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan Vol. 7 (3)* 555-564.
- Helvira, R, and E P Rizki. 2020. "Pengaruh Investasi, Upah Minimum Dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Kalimantan Barat." *JISeB Vol 1 (1)* 53-62.
- Herman, Ahmad, interview by Nurholis Huda. 2018. *Sosiolog Ahmad Herman: UKT Mahal Sebabkan Banyak Mahasiswa yang Rebutan Bidikmisi* (Juli 27).
- Huda, Sabiqul. 2021. "Permasalahan Sekolah di Perkotaan." *Cross Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional Vol. 4 (1)* 30-36.
- Kemenristekdikti. 2018. *Statistik Pendidikan Tinggi 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. 2017. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Jakarta.
- Kepala Bappenas. 2018. "Sambutan Menteri Perencanaan." *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Jakarta: KPPN/Bappenas, Mei.
- KPPN/Bappenas. 2018. *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Jakarta: KPPN/Bappenas.
- KPPN/Bappenas. 2020. *Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Selatan*. Audiensi, Jakarta: KPPN/Bappenas.
- Lewrick, M. et al., 2011. *Education For Entrepreneurship And Innovation : "Management Capabilities For Sustainable Growth And Success."* . New York.
- Mua, V B, E P Manginsela, and J Baroleh. 2017. "Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah dari Anak Petani dan Non-Petani Di Desa Sea dan Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *Agri-Sosioekonomi 13 (3)* 313–322.
- Muhammad, Hamid, interview by Wilda Fizriyani and Republika. 2016. *SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, Kemendikbud: Agar Lebih Fokus* (Februari 22).
- Ramiayu, Deasy Dwi . 2016. "Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 1-16.
- Rutfiana, Ririh Tia, and Banatul Hayati. 2020. "Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017." *Diponegoro Journal of Economics Vol. 9 (2)* 41-55.
- Saepuloh, Dadang, and Agus Suherman. 2018. "Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang." *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 18 (2)* 98-111.

- Sari, Anggun Kembar. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat*. Skripsi, Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sevima. 2019. *Apa Itu Uang Kuliah Tunggal (UKT) & Biaya Kuliah Tunggal (BKT)?* Maret 25. Accessed Juli 04, 2020. [https://sevima.com/apa-itu-uang-kuliah-tunggal-ukt-biaya-kuliah-tunggal-bkt/#:~:text=UKT%20dan%20BKT-,Uang%20Kuliah%20Tunggal%20\(UKT\),Negeri%20\(PTN\)%20di%20Indonesia%20](https://sevima.com/apa-itu-uang-kuliah-tunggal-ukt-biaya-kuliah-tunggal-bkt/#:~:text=UKT%20dan%20BKT-,Uang%20Kuliah%20Tunggal%20(UKT),Negeri%20(PTN)%20di%20Indonesia%20).
- Siskawati, Nelva , Roberta Zulfhi Surya, and Endy Sudeska. 2021. "Pengaruh Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Riau." *Jurnal Selodang Mayang Vol. 7 (3)* 173-177.
- Suroto, B., & Pailis, E. A. 2017. "Entrepreneurial Spirits Developments of Local Students." *Journal of Microeconomics and Macroeconomics* 5(1), 22-25.
- Wardhana, Adhitya, and Bayu Kharisma. 2021. "Determinan Tingkat Pengangguran Antar Provinsi di Indonesia." *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 241-250.
- Yusniar. 2013. "Analisis Potensi Ketenagakerjaan Di Kalimantan Selatan." *Jurnal Spread Vol. 3 (2)* 153-166.
- Yusof, Mohd Idham Mohd , and Mariani Ariffin. 2021. "Youth Engagement in the Implementation of The Sustainable Development Goals (SDGS) in Asean Countries." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol. 10 (3)* 956-974.